Kedaulatan Rakyat 1

RABU LEGI, 6 APRIL 2016
(27 JUMADILAKIR 1949)

Analisis KR

Independen = Deparpolisasi

Tunjung Sulaksono

PILKADA serentak memang baru akan digelar setahun lagi. Akan tetapi suhu politik di beberapa daerah mulai menghangat seiring dielusnya kandidat-kandidat yang diharapkan akan bertarung pada Februari 2017 mendatang. Suhu politik yang makin meningkat juga disebabkan mulai maraknya geliat gerakan masyarakat yang mendukung calon independen dalam Pilkada. Di Jakarta ada Teman Ahok. Sementara di Kota Yogyakarta muncul gerakan Jogja Independent atau Joint.

Kemunculan gerakan masyarakat pendukung calon independen tersebut ditanggapi dengan bermacam respons. Berbagai elemen masyarakat menanggapinya secara positif. Kemunculan kandidat independen dianggap membuka ruang alternatif bagi masyarakat yang potensial, akan tetapi tidak memiliki atau tidak menyukai proses dan mekanisme internal partai yang cenderung tidak transparan dan *high cost*. Akan tetapi kalangan elite partai umumnya menilai kemunculan kandidat independen secara negatif. Bahkan ada yang memaknainya sebagai suatu upaya deparpolisasi. Benarkah?

* Bersambung hal 7 kol 5

Independen

Sambungan hal 1

Partai politik adalah institusi yang dianggap demikian relevan dalam demokrasi modern. Peranan partai politik tidak tergantikan oleh institusi apapun bahkan oleh elemen-elemen *civil society* maupun organisasi lain yang merepresentasikan kepentingan publik. Partai menjadi suatu kebutuhan yang tak terhindarkan. Sulit membayangkan demokrasi respresentatif dapat berjalan tanpa eksistensi partai politik (Bryce, 1921:119; Schattsneider, 1942:1).

Partai politik menjadi jembatan yang menghubungkan institusi pemerintah dengan elemen-elemen masyarakat sipil dan rakyat pada umumnya. Partai politik juga mengorganisir berbagai perbedaan ideologis dan kepentingan dalam masyarakat. Begitu pentingnya kedudukan dan arti penting partai politik dalam kehidupan demokrasi. Sehingga banyak ilmuwan politik meyakini adanya suatu aksioma bahwa tidak ada satu sistem politik pun yang dapat berlangsung tanpa partai politik (Macridis, 1996: 17).

Karena kedudukannya yang demikian penting dalam poros negara-masyarakat maka partai diberikan tanggung jawab berupa fungsi-fungsi yang luar biasa menentukan dalam proses politik. Mulai dari agregasi kepentingan, sosialisasi dan pendidikan politik, komunikasi politik, hingga rekrutmen pejabat-pejabat publik. Dan hari ini, nyaris tidak ada jabatan publik di Indonesia tanpa keterlibatan partai politik di dalamnya.

Ketika partai menduduki posisi yang demikian penting dan strategis dalam skema demokrasi elektoral, masyarakat Indonesia dihadapkan dengan realitas yang menyesakkan dada. Banyak pandangan minor dan sinis dari masyarakat terhadap sepak terjang partai politik di Indonesia. Hal ini terlacak dari demikian banyaknya hasil survei yang menempatkan partai sebagai lembaga publik dengan tingkat kepercayaan terendah (Mietzner, 2013:4). Para ilmuwan politik juga telah mengidentifikasi partai sebagai *link* terlemah dalam proses demokratisasi di Indonesia. Salah satu di antara kelemahan tersebut muncul dari fakta yang menunjukkan kegagalan partai politik menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik sesuai harapan masyarakat melalui Pilkada.

Merujuk berbagai catatan tersebut Marcus Mietzner (2013:4) meyakini bahwa Indonesia berada dalam suatu gejala *soft antiparty sentiment*. Mietzner sampai pada kesimpulan itu dengan melihat dari rekam jejak dukungan publik terhadap partai yang rendah, ternyata tidak diimbangi turunnya dukungan publik secara signifikan terhadap demokrasi. Artinya, pada satu sisi masyarakat memiliki sikap negatif terhadap partai politik. Akan tetapi pada sisi lain, masyarakat masih percaya terhadap legitimasi sistem demokrasi, masih menginginkan eksistensi partai politik, dan berharap agar partai politik dapat memperbaiki kinerjanya.

Kemunculan gerakan-gerakan pendukung calon independen bisa kita maknai dalam kerangka *soft antiparty sentiment* itu. Gerakan-gerakan tersebut sama sekali tidak mempersoalkan eksistensi partai politik, menegaskan partai politik, atau merupakan suatu upaya deparpolisasi, yaitu upaya disengaja atau tidak disengaja mengurangi, atau bahkan menihilkan peran partai politik dalam demokrasi.

Gerakan-gerakan tersebut seolah hanya mengingatkan dan menjewer telinga partai-partai politik agar kembali ke *khittah*. Untuk menjalankan fungsi rekrutmen politik dengan lebih sensitif terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat daerah dengan mekanisme dan proses yang lebih baik. Bukan menjadikan Pilkada sebagai komoditi politik transaksional. Gagasan ko-eksistensi antara para kandidat baik yang diusung partai maupun dari jalur independen dalam arena Pilkada diharapkan akan menawarkan jalan keluar bagi problematika rekrutmen pemimpin politik di daerah.

(Penulis adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY dan Peneliti Inspect)-d